

**Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo)**

<sup>1</sup>Nanang Al Hidayat, <sup>2</sup>Asra'i Maros

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA Setih Setio Muara Bungo  
Corresponding Author: [nananghidayat108@yahoo.co.id](mailto:nananghidayat108@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui hambatan dan upaya untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (*komprehensive*) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada penelitian ini adalah tingkat 2. Hasil penelitian menunjukan hambatan BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

**Kata Kunci** : BPD, Peran, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

**PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang, untuk itu berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa untuk penyelenggaraan desa perlu adanya perencanaan pembangunan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa. Menurut Pasal 30 ayat 2 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa secara eksplisit dinyatakan : Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program /kegiatan masuk ke desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Kalau kita cermati regulasi di atas, tahap awal penyusunan RKP Desa diawali dengan Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa yang mengatur bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi dasar atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pada kenyataannya di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa.

Ini menunjukkan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa (dusun)

tersebut belum melaksanakan perannya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa masih dimonopoli oleh pemerintah desa tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan substansi Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut.

Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Populasi atau situasi sosial penelitian ini adalah Pemerintah Dusun, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Yang menjadi informan kunci atau yang disebut dengan unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Datuk Rio Dusun Teluk Panjang
- 2) Sekretaris Dusun Teluk Panjang
- 3) Kaur Pembangunan Dusun Teluk Panjang
- 4) 5 (lima) orang BPD Dusun Teluk Panjang
- 5) 1 (satu) orang tokoh Masyarakat Dusun Teluk Panjang
- 6) 3 (tiga) orang masyarakat Dusun Teluk Panjang

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selanjutnya menurut Sugiono (2012:156) apabila dilihat dari teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan *interview* yaitu:

1. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah:

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa terjadi interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut pada pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hambatan BPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo.**

Berdasarkan temuan peneliti tentang peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, yang mana peran tersebut belum berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku sehingga BPD belum mampu berperan secara maksimal dalam rangka proses perencanaan penggunaan dana-dana yang masuk ke desa melalui penyusunan RKP Desa. Maka peneliti mencoba menelusuri faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Menurut analisis peneliti dan temuan di lapangan faktor pertama yang menyebabkan BPD Dusun Teluk Panjang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal adalah faktor kualitas sumber daya manusia. Tidak bisa dipungkiri di negara Indonesia khususnya di pedesaan secara umum kualitas sumber daya manusia masih tertinggal dibanding negara-negara lain seperti Amerika, negara-negara di Eropa, Cina, bahkan dengan Singapura dan Malaysia. Hal ini relevan dengan data yang disajikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo (Bisnis.com, 2017) beliau mengatakan “kurangnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan dikarenakan sebagian besar tenaga kerja di kawasan pedesaan masih di dominasi lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 57,79 %, menyusul Sekolah menengah

pertama (SMP) sebanyak 18,87 %, dan lulusan sekolah menengah atas berjumlah 13,07%.

Melalui data di atas, wajar jika banyak desa di Indonesia penyelenggaraan pemerintah desa masih belum maksimal, masih banyak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara aturan dengan realitas. Hal ini menunjukkan sebenarnya masalah yang terjadi di desa secara umum karena kualitas seluruh unsur pemerintahan yang masih relatif rendah. Hal inilah yang terjadi di dusun teluk panjang, khususnya pada BPD yang tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Hal ini diketahui setelah peneliti menanyakan kepada rio (baca : kepala desa) tentang latar belakang pendidikan anggota BPD, data yang peneliti dapatkan yaitu dari lima orang anggota BPD hanya satu yang sarjana, dua lainnya tamat SMA, bahkan dua lagi hanya tamat SMP. Hal ini coba peneliti konfirmasi kepada ketua BPD dan beliau membenarkan yang disampaikan oleh rio “kami anggota BPD hanya satu orang yang sarjana yang lain saya sendiri hanya SMA tiga lainnya satu tamatan SMA dua hanya tamatan SMP”.

Faktor kedua yang menyebabkan lemahnya peran BPD Dusun teluk panjang dalam penyusunan RKP Desa disebabkan karena tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah sehingga kemampuan untuk menempuh pendidikan tinggi sulit terwujud ditambah lagi ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan menjadi faktor pendukung. Hal ini dibenarkan oleh seluruh anggota BPD dusun teluk panjang bahwa faktor ekonomi yang lemah sehingga mereka tidak mampu menempuh pendidikan lebih jauh. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Saleh sekretaris BPD beliau mengatakan “memang saya hanya mampu sekolah hingga tingkat SMA karena ketidakmampuan ekonomi sehingga saya tidak mampu menempuh pendidikan lebih jauh”. Hal senada juga disampaikan oleh Hambali anggota BPD beliau mengatakan “saya tidak melanjutkan pendidikan bukan karena tidak ada keinginan namun karena faktor ekonomi yang sulit sehingga tidak ada biaya untuk sekolah”. Sedangkan Sarif anggota BPD mengatakan “dulu saya memang tidak mau sekolah tinggi karena saya lebih memilih bekerja untuk mendapat penghasilan”. Dari uraian di atas dapat diketahui tingkat pendidikan anggota BPD dusun teluk panjang relatif rendah yang disebabkan faktor ekonomi dan keengganan untuk sekolah. Hal ini dibenarkan oleh Kaur Pembangunan Dusun Teluk Panjang beliau mengatakan “tingkat ekonomi masyarakat di Dusun kami memang relatif rendah sehingga kemampuan untuk sekolah juga rendah” (2019).

Faktor ketiga, yang menyebabkan masih minimnya keterlibatan BPD dusun teluk panjang dalam proses penyusunan RKP Desa adalah seluruh anggota BPD memiliki pekerjaan lain yang

cukup menyita waktu sehingga perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dusun menjadi kurang. Hal ini diketahui setelah penulis menanyakan kepada ketua BPD dusun teluk panjang beliau mengatakan “memang kami akui kami BPD tidak begitu fokus dalam mengurus pemerintah dusun, karena semua kami anggota BPD berkecukupan kecuali wakil ketua BPD Ibnu Hajar yang aktifitasnya mengajar di sekolah” Dari wawancara di atas diketahui bahwa seluruh anggota BPD memiliki kesibukan lain sehingga tanggung jawab terhadap pemerintah dusun seperti penyusunan RKP Desa terabaikan. Peneliti mencoba mewawancarai Sapuan dan Ibnu masyarakat Dusun Teluk Panjang terkait kinerja BPD beliau mengatakan “kami melihat BPD setiap hari hanya sibuk dengan aktifitas masing-masing seperti berkecukupan atau mengajar” (2019).

Faktor keempat yang menyebabkan masih minimnya keterlibatan BPD Dusun Teluk Panjang dalam proses penyusunan RKP Desa adalah tunjangan BPD yang relatif rendah sehingga BPD tidak mungkin hanya mengandalkan penghasilan dari BPD ditambah lagi pencairannya tidak tiap bulan. Ibnu Hajar wakil ketua BPD mengatakan “kami tidak mungkin hanya mengandalkan tunjangan BPD karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka kami mencari sumber penghasilan lain, bahkan kami sudah lebih dulu menjalani pekerjaan kami sebelum menjabat BPD seperti saya sudah 7 tahun mengajar di SD sedangkan menjadi anggota BPD baru dua tahun”.

Faktor kelima yang mempengaruhi kinerja BPD adalah proses rekrutmen BPD yang diserahkan ke desa, artinya desa bisa menentukan sendiri mekanisme pemilihan anggota BPD bisa secara langsung oleh masyarakat atau melalui perwakilan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. hal ini menjadi celah, bisa saja di suatu desa diatur sedemikian rupa agar orang-orang tertentu yang terpilih menjadi anggota BPD maka orang-orang yang diundang sebagai perwakilan masyarakat sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun mekanisme pemilihan langsung juga masih terdapat kelemahan yaitu terjadi praktek money politic sehingga terpilih orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ingin bekerja untuk masyarakat, ditambah lagi masih lemahnya monitoring dari pemerintah. Karena memang tidak ada sistem yang sempurna.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD khususnya di Dusun Teluk Panjang sehingga kinerja BPD belum maksimal. Permasalahan seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena dengan minimnya peran BPD pada

suatu desa secara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa itu sendiri karena walau bagaimanapun BPD adalah wujud demokrasi di desa sebagai penyeimbang pemerintah desa yang mewakili kepentingan masyarakat. saat ini di Indonesia total anggaran desa yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 hingga 2018 sebanyak Rp. 187,65 (medcom.id 2019) triliun belum begitu nampak perubahan di desa.

Berdasarkan data ICW (Indonesian Corruption Watch), angka korupsi khusus dana desa sebesar 181 kasus dan menyebabkan kerugian negara sekitar 40,6 miliar (medcom.id 2019). Oleh karena itu sangat diperlukan upaya nyata dalam mengatasi permasalahan tersebut khususnya di Dusun Teluk Panjang agar peran BPD dalam proses penyusunan RKP Desa maksimal agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan pada gilirannya akan berdampak positif pula terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Peran BPD Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.**

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang adalah pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini BPD Dusun Teluk Panjang dengan cara memberikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, bahkan bisa juga pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa itu sendiri dengan mengundang pakar agar BPD khususnya dan seluruh aparatur pemerintahan desa umumnya mengetahui peran dan fungsi masing-masing serta tupoksinya. Yang mana pelatihan tersebut menurut peneliti harus ditekankan kepada penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan (aplikatif), partisipatif (partisipasi warga) bahkan lebih teknis lagi seiring dengan kemajuan teknologi informatika, pemerintah kabupaten atau Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi perlu juga memberikan pelatihan di antaranya pelatihan internet, pelatihan GIS (Geography Information System) seperti pemahaman mengenai peta desa, pengukuran lahan, manajemen pemerintahan desa agar memberikan edukasi dan bekal pemikiran kepada BPD khususnya dan aparatur pemerintahan dusun Teluk Panjang pada umumnya.

Mengenai pelatihan seperti yang penulis jelaskan di atas, ternyata di Dusun teluk panjang belum pernah dilakukan. Hal ini peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan rio

(baca: kepala desa) beliau mengatakan “di Dusun kami (Teluk Panjang) belum pernah dilakukan pelatihan peningkatan SDM baik terhadap aparaturnya pemerintah dusun maupun BPD”. (2019) Hal ini dibenarkan oleh ketua BPD beliau mengatakan “kami belum pernah mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dusun maupun pemerintah daerah”. (2019) Dengan kondisi seperti ini peneliti menganjurkan agar pemerintah dusun teluk panjang menganggarkan untuk dilakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM bagi seluruh unsur pemerintahan desa.

Upaya kedua yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini BPD Dusun Teluk Panjang adalah terkait regulasi mengenai besaran tunjangan anggota BPD. Saat ini tunjangan anggota BPD masih relatif rendah ditambah lagi pencairannya tidak tiap bulan hal ini menyebabkan BPD tidak bisa fokus mengabdikan diri di pemerintahan desa karena masih harus mencari sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menentukan besaran tunjangan yang wajar setidaknya UMR bagi BPD khususnya dan pemerintah dusun pada umumnya. Semoga dengan meningkatnya kesejahteraan berpengaruh pula meningkatnya kinerja BPD. Karena banyak penelitian yang menyimpulkan korelasi antara tingkat kesejahteraan dengan kinerja (misalnya karyawan).

Upaya *ketiga* yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini BPD Dusun Teluk Panjang adalah harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dusun termasuk BPD di Dusun Teluk Panjang agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sesuai yang diharapkan oleh undang-undang. Serta memaksimalkan peran pendamping desa/pendamping kecamatan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan secara intens kepada BPD Dusun Teluk Panjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## **KESIMPULAN**

Di Dusun Teluk Panjang, BPD belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Musyawarah desa dilakukan masih dengan inisiatif dari pemerintah desa, tidak ada dilakukan kegiatan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa; & membentuk tim

verifikasi sesuai jenis kegiatan & keahlian yang berasal dari masyarakat atau SKPD kabupaten. Musyawarah desa langsung pada tahap penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan mendengarkan usulan-usulan dari BPD, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang. BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pemerintah Dusun dan BPD Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried dan Baharuddin, (2013). *Pengantar Ilmu Administrasi*, Gorontalo, PT BIFAD Press.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Fadilia Hana dkk, *Ini Itu Demokrasi*, Tim Pamphlet Demorkrasi, KPG, Jakarta, (2015).
- Harjono, (2009), *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahakamah Konstitusi.
- Mukhtar, (2013), *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group, Jakarta.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Republik Indonesia, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Raharjo Adisasmita, (2013), Pembangunan Perdesaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Samuel Purba, (2015), Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikunto, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wiwin, (2017), Peran Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi.